**LAMPIRAN III.1**

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN** **DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

| **No.** | **ASPEK** | **FOKUS** | **No.** | **IKK** | **RUMUS/** **PERHITUNGAN** | **JENIS DATA** | **CAPAIAN KINERJA** | **Keterangan** | **OPD PENGAMPU** | **DATA DUKUNG** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |
| 1 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg Ketertiban Umum | 1 | Keberadaan PERDA IMB | Ada/tidak ada PERDA | Apabila ADA:Sebutkan legal formalnya.PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang -- | Ada/tidak | Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP | DPM PTSP NAKER / DINPERKIM | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb  |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg Ketertiban Umum | 2 | Rasio Rumah ber IMB | Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya | * Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2019, sebanyak ----- unit.
* Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak ------ Unit.
 | ....... % | Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP | DINPERKIM | * Daftar Rincian yang menunjukan jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2019 (minimal per Kecamatan)
* Daftar Rincian yang menunjukan jumlah seluruh rumah sd Akhir tahun 2019 (minimal per Kecamatan)
 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg Ketertiban Umum | 3 | Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum | Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum | Apabila ADA:Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor: --- ---Tahun ------ tentang ----- | Ada/tidak | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM / SATPOL PP | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb  |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg kependudukan | 4 | Pengurusan E-KTP | Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP | * Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP
* Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP
 | ...... % | Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil. | DINDUKCAPIL | Daftar yang menunjukan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, dan daftar yang menunjukan jumlah penduduk per 31/12/2019 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg kependudukan | 5 | Pengurusan KIA | Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA | * Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA
* Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA
 | --------% | Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP. | DINDUKCAPIL | Daftar yang menunjukan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KIA, dan daftar yang menunjukan jumlah Anak per 31/12/2019 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) | 6 | Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk | Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 % | * Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = ----- orang
* Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = ----- orang
 | ... per10.000penduduk | Sumber data dari BKD/dinas Dukcapil | SATPOL PP/ BKD / DINDUKCAPIL / | * Daftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 2019 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang
* Daftar yang menunjukan jumlah penduduk per des 2019
 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Kebijakan bidang Penanganan Bencana | 7 | Keberadaan PERDA tentang Penangangan Bencana | Ada atau tidak ada PERDA Penangangan Bencana | Apabila ADA:Sebutkan dasar hukumnya.PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang----- (yang mengatur PenangananBencana) | Ada/tidak ada | Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum | BPBD / BAG. HUKUM | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb  |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten | 8 | Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten | Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten | Apabila ADA:Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- | Ada/ tidak ada | Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan | DLH | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb  |
| 2 | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Penyampaian laporan kepada pemerintah | 9 | Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019, | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Bukti Pengiriman :LPPD Tahun 2019 disampaikan padatanggal ---- 2020 sesuai surat pengantar Nomor-------tanggal ------ 2020. | Tepat / tidak tepat | Sumber data dari Bagian Pemerintahan/ Otonomi Daerah | BAG. PEMERINTAHAN | Surat Pengiriman LPPD Tahun 2019 Kepada Gubernur selaku Kepanjangan Dari Pusat |
|  | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Penyampaian laporan keuangan dan kinerja | 10 | Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008 | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Bukti Pengiriman:* Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal --- 2020 sesuai surat pengantar Nomor -- tanggal --- 2020
* Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal -----
 | Tepat/tidak tepat | Sumber data dari Bagian Keuangan | BPPKAD | FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kab/Kota TA 2019 kepada BPK RI  |
|  | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 11 | Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM | Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM | Apabila ada, sebutkan | Ada atau tidak | Bagian Hukum | BAG. HUKUM | FC cover, hal kedua dan halaman pengesahan perda tsb |
|  | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Hubungan antar daerah | 12 | Kerjasama dengan daerah lain | Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019 | Jumlah MOU yang masih berlaku padatahun 2019, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari:1. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------.
2. MOU dengan ------- tentang kerjasama -------.
3. Dst---
 | ..... MOU | Sumber data dari Bagian Pemerintahan | BAG. PEMERINTAHAN | Fc Mou |
| 3 | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Sinkronisasi Pelaksanaan pembanguna n nasional dan daerah | 13 | Kesesuaian prioritas pembangunan | Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2 | * Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak--- prioritas.
* Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 Program/agenda prioritas.
 | ...... % | Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan | BAPPEDA | FC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Kewenangan | 14 | Urusan wajib yang diselenggarakan daerah | Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100% | Urusan Wajib yang dilaksanakan padaTahun 2019 (APBD) = ------ urusan. | ...... % | Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2019. | Pemerintahan | Fc LPPD yang menunjukkan adanya Urusan Wajib |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Keuangan | 15 | Waktu penetapan PERDA APBD 2019 | Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019 | Apabila TEPAT:Sebutkan dasar hukumnya.PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang----- APBD 2019. (Paling lambat tanggal31 Desember 2018). | Tepat/ Tidak Tepat | Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD | BPPKAD | FC halaman depan (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya Perda Penetapan APBD Murni (induk) TA 2019 |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 16 | Keberadaa PERDA tentangpengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 | Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah | Apabila ADA:Sebutkan legal formalnya.PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang --- (pengelolaan keuangan daerah) | Ada/tidakada | Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD | BPPKAD | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 17 | Belanja untuk pelayanan dasar | Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% | Belanja pelayanan dasar APBD Tahun2019.1. Urusan Pendidikan Rp. -
2. Urusan Kesehatan Rp. --
3. Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.—
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp –
5. Urusan Trantibum dan Linmas Rp ------
6. Urusan Sosial Rp

Total Belanja pelayanan dasar Rp. ------- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. ------- | ...... % | Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit). | BPPKAD | FC LRA audited atau Perda pertanggungjawaban APBD TA 2019 (untuk urusan pendidikan, kesehatan, LH, PU, Sosial, Naker, UMKM, Kesbangpoldagri, Dukcapil)  |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 18 | Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan | Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% | Belanja Pendidikan dan KesehatanAPBD Tahun 2019.1. Urusan Pendidikan Rp. –
2. Urusan Kesehatan Rp. ---

Total Belanja Pend & Kes Rp. ---- | ...... % | Sumber data dari bagian Keuangan | BPPKAD | FC LRA audited atau Perda pertanggungjawaban APBD (untuk urusan pendidikan dan kesehatan)  |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Pelayanan Publik | 19 | Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan | Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik | Apabila ADA:Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ------Tahun ------- tentang -------- (standar pelayanan publik) | Ada/tidak ada | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | FC cover, hal kedua dan halaman pengesahan perda tsb |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Kepegawaian | 20 | Ratio PNS terhadap penduduk | Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk | Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019sebanyak -------- orang.Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019 sebanyak -------- orang. | ----- | Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil | BKD / DINDUKCAPIL | * Daftar jumlah PNS per SKPD per 31 Des 2019 yang ditandatangani pejabat BKD
* Daftar jml penduduk dari dukcapil yg di ttd pejabat berwenang
 |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 21 | Rasio PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan) | Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100% | Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)... orangJumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 ... orangApabila ADA,sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian) | Ada/tidak | Sumber data dari BKD | BKD | Daftar rincian PNS per SKPD dengan kualifikasi minimal III 3 per 31 Des 2019 yang ditandatangani pejabat BKD |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Kelembagaan | 22 | Penataan Perangkat Daerah | Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016 | Jumlah Perangkat Daerah, sbb:1. Bagian (Setda) = ----- unit
2. Dinas = ----- unit
3. Badan = ----- unit
4. Kantor = ----- unit
5. Rumah Sakit = ----- unit
6. Lembaga Teknis lainya = ----- unit
7. Kecamatan/Distrik = ----- unit

Jumlah Perangkat Daerah = ----- unit | ------- unit | Sumber data dari Bagian Ortala | BAG. ORGANISASI | FC perda ttg SOTK yang di tandatangani pejabat berwenang |
| 4 | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD | Produk peraturan perundangan | 23 | PERDA yang ditetapkan | Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019 | PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak ------ Perda ( Daftar terlampir) | … PERDA | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar Nomor dan Tanggal Perda yang diterbitkan tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang  |
|  | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD | RAPERDA yang diajukan tahun berjalan | 24 |  RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 | Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019 | * RAPERDA yang disetujui tahun 2019, sebanyak --- RAPERDA.
* RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019, sebanyak ------- PERDA.
 | … % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | * Daftar Raperda yg disetujui
* Daftar Raperda yg diusulkan
 |
| 5 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | 25 | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019 x 100% | * Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak------ keputusan.
* Keputusan DPRD dalam tahun 2019, sebanyak------ keputusan.
 | ... % | Sumber data dari Setwan | SETWAN | * Jumlah rekomendasi DPRD tentang LKPJ tA 2018)
* data yang menunjukkan tindaklanjut rekomendasi DPRD tentang LKPJ TA 2018
 |
| 6 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindaklanju t keputusan Bupati | 26 | Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti | Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2019 x 100% | * Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak------ keputusan.
* Keputusan Bupati tahun 2019 yang di usulkan, sebanyak ------- keputusan.
 | .... % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar Keputusan Bupati/Walikota Tahun 2019 yang ditandatangani pejabat berwenang  |
|  | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindaklanjut Peraturan Bupati | 27 | Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti | Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2019 x 100% | * Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak ------ Per- Bupati.
* Peraturan Bupati dalam tahun 2019 sebanyak ------ Per- Bupati.
 | .... % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2018 yg ditandatangani pejabat berwenang  |
| 7 | KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | PERDA yang dibatalkan | 28 | Jumlah PERDA yang dibatalkan | Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% | Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- ,yang terdiri dari:1. Perda Nomor -------- Tahun 2019 tentang ---
2. Perda Nomor -------- Tahun 2019 tentang -----
3. Dst.

Perda yang dikirimkan untuk dievaluasioleh Pemerintah sebanyak ------ | .... % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang |
| 8 | INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN P UBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | PERDA tentang konsultasi publik | 29 | Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik | Ada/tidak PERDA/PerBup | Apabila ADA,Sebutkan dasar hukumnya:PERDA atau Perbup Nomor Tahun -----tentang ----- (konsultasi publik) | Ada/tidak | Sumber data dari Bagian Hukum/Setwan | BAG. HUKUM / SETWAN | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN P UBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik | 30 | Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) | Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup | Apabila ADA,* Sebutkan Nama Medianya :------
* Sebutkan Perbup nomor --- tahun ---tentang ------.
 | Ada/tidak | Sumber data dari Dinas Kominfo | DINKOMINFO | Print Out halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen pemda |
| 9 | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Serapan dana perimbangan | 31 | Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan | Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% | Dana perimbangan yang terserap Tahun2019 sebesar Rp. ---------Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. - | .... % | Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | Laporan Keuangan Kab/Kota 2019 setelah Audit BPK RI mengenai : Dana Perimbangan |
|  | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Alokasi Belanja pada APBD dari DAU | 32 | Belanja Publik terhadap DAU | Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% | * Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp---
* DAU Tahun 2019, sebesar Rp. --------
 | .... % | Sumber data berasal dar Realisasi Lapora Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | * Belanja Langsung (Realisasi)
* DAU Tahun 2019
 |
|  | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Alokasi Belanja pada APBD | 33 | Belanja Langsung terhadap total APBD | Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100% | * Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp------
* Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp…….
 | .... % | Sumber data berasal dar Realisasi Lapora Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | * Total Belanja langsung tahun 2019 (realisasi)
* Total Belanja APBD tahun 2019 (realisasi)
 |
| 10 | INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD | Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 34 | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi) | Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100% | * PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp ------
* Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. -----
 | ....% | Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019 |
| 11 | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD  | Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) | 35 | Opini BPK terhadap LapKeu Daerah  | Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeuDaerah Daerah untuk2 tahun terakhir | * Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: ----
* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: --------
 | Opini tahun2018 = ------Opini tahun2019= ----- | Opini: 1) WTP/ *unqualified opinion*); 2) WDP/ *qualified opinion*); 3) TMP/ *disclaimer opinion*), atau TIDAK WAJAR TW/*adverse opinion*). Opini LHP Tahun 2018, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda | BPPKAD | FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kab/Kota tahun 2018 & th 2019 |
|  | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD  | Besaran SILPA | 36 | Rasio SILPA thdp total pendapatan  | Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% | * SILPA Tahun 2019, sebesar Rp -------
* Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. ---
 | …. % | Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | * SILPA thdp total pendapatan
* Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2019
 |
|  | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD  | Realisasi belanja | 37 | Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja  | Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100% | * Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp –
* Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ------
 | …… % | Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD | BPPKAD | Lapkeu audited BPK mengenai anggaran belanja dan realisasi belanja APBD th 2019 |
|  | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD  | Pengawasan Inspektorat Kabupaten | 38 | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 | * Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak ------- temuan.
* Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak ------- temuan.
 | .... % | Sumber data dar Inspektorat. Dat merupakan rekomendas dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti. | INSPEKTORAT | Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti **dibagi** dengan temuan BPK RI s.d. tahun 2019 |
| 12 | PENGELOLAAN POTENSI DAERAH | Peta potensi daerah | 39 | Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD 4 | Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD X 100% | * Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp.
* Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 APBD Rp -------
 | .... % | Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD) | BPPKAD | * Laporan Keuangan Kab/Kota 2019 setelah Audit BPK RI mengenai Realisasi PAD

Potensi PAD yang ada dalam RPJMD |
|  | PENGELOLAAN POTENSI DAERAH | Peningkatan PAD | 40 | Peningkatan PAD | Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 X 100% | * Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp. ---
* Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp.---
 | .... % | Sumber data dari BPKAD | BPPKAD | Laporan Keuangan Kab/Kota 2019 setelah Audit BPK RI mengenai PAD 2018 dan 2019 |
| 13 | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penghargaan | 41 | Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019. | Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019 | Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari1. -------.
2. -------.
3. -------.
4. Dst --.
 | .... Penghargaan | Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan | BAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN | FC Piagam, Surat Keputusan dll |
|  | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadaan barang dan jasa | 42 | Keberadaan E-procurement | Ada/Tidak | Apabila ADASebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun------. | Ada/Tidak | Sumber data dari ULP. Data berupa proses E- procurement | BAG. PBJ | Lampirkan Print out proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang. FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman ditandatanganinya perda tentang E-Procurement |
|  | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Daya saing daerah | 43 | Jumlah persetujuan investasi | Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019 | Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ------- ijin | ... ijin | Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN >=200 Juta) | DPM PTSP NAKER | Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola urusan penanaman modal PemKab/Kota pd tahun 2019 |